

Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

The Effect of the Values of Transparency and Accountability on Public Sector Financial Management at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province

Ririn Rusrina

Jurusan Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email : ririnrusrinafilia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: untuk memperoleh bukti mengenai adanya pengaruh secara parsial maupun simultan antara nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. variabel penelitian ini adalah: (1) Pengelolaan Keuangan Sektor Publik sebagai variabel terikat (Y) dan (2) Transparansi dan Akuntabilitas sebagai variabel bebas (X). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai aktif yang bekerja pada bidang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan sektor publik yaitu sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian, serta sub bidang perencanaan dan pelaporan, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 30 pegawai aktif di ketiga bidang tersebut yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan $Y = 14,789 + 0,390 + 0,588 + e$. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. Diketahui juga bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik.

Abstract

This study aims: to obtain evidence of the influence partially and simultaneously between the values of transparency and accountability on public sector financial management at the Regional Revenue Agency Office of South Sulawesi Province. The variables of this study are: (1) Public sector financial management as the dependent variable (Y) and (2) Transparency and Accountability as independent variables (X). The population in this study are active employees who work in fields that are directly related to public sector financial management, namely the finance sub-division, general and civil service sub-division and planning and reporting sub-sector, while the sample is 30 active employees in the three fields which are determined using method *purposive sampling*. The data in this study were collected through distributing questionnaires which were processed using multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study indicate $Y = 14,789 + 0,390 + 0,588 + e$. Based on the results of this analysis, it can be seen that Transparency has a positive effect on Public Sector Financial Management and Accountability has a positive effect on Public Sector Financial Management. It is also known that Transparency and Accountability simultaneously have a positive effect on Public Sector Financial Management.

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia berakibat pada munculnya semangat demokratis, akuntabilitas dan transparansi di sektor pemerintahan. Reformasi di berbagai bidang membawa kepada terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan dengan berciri pada *Good Governance*. Masyarakat memiliki harapan agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan kepada publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah (pemda).

Pemda melaksanakan transparansi dan akuntabilitas karena kewajiban dan adanya tekanan yang kuat dari pemerintah pusat. Dipertegas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaga Daerah.

Transparansi dapat memerangi korupsi melalui banyak mekanisme seperti membuat tindakan korupsi lebih beresiko, memberikan insentif kepada pejabat publik, sehingga mudah untuk memilih pejabat yang jujur, membuat pejabat lebih bertanggung jawab, dan membantu menjaga norma integritas dan kepercayaan. Transparansi menjanjikan akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/jabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas memiliki tujuan utama untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan yang di danai keuangan daerah kepada masyarakat, dengan kepala desa sebagai pertanggungjawab utama.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari web *makassar.sindoneews.com*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumpulkan pemerintah kabupaten/kota di Ruang Rapim, Kantor Gubernur Sulsel (Selasa, 12 Maret 2019). Dengan harapan daerah dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Namun pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan daerah mengeluhkan terkait transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulsel. Salah satunya, Bapenda Makassar yang menyoal data pajak penerangan jalan yang diterima Bapenda Sulsel dari PLN. Keluhan itu lantaran selama ini Provinsi hanya mengirim dana bagi hasil melalui rekening tanpa mengetahui rincian data jumlah pelanggan listrik.

Berdasarkan data di atas, dengan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Bapenda Sulsel. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Sektor Publik

a. Pengertian Keuangan Sektor Publik

Menurut (Halim, 2012)

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sedangkan menurut (Bastian, 2006)

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik analisis akuntansi yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

b. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan sektor publik memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan
- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi
- 4) Kelangsungan Organisasi
- 5) Hubungan dengan Masyarakat
- 6) Sumber Fakta dan Gambaran

c. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

- 1) Pembayar pajak
- 2) Pemberi dana bantuan
- 3) Investor
- 4) Pengguna jasa
- 5) Karyawan/Pegawai
- 6) Pemasok/Vendor
- 7) Dewan legislatif
- 8) Manajemen

- 9) Pemilih
- 10) Badan pengawas

d. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, indikator keberhasilan pengelolaan keuangan sektor publik meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

2.2 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut (Sujarweni, 2015)

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut (Wida, 2016)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2009) yaitu:

- 1) *Informativeness* (informatif): Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- 2) *Openess* (keterbukaan): Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan

bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

- 3) *Disclosure* (pengungkapan): Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Adapun prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia adalah :

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- 3) Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

d. Indikator Transparansi

Menurut (Shafratunnisa, 2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- 2) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan
- 3) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

2.3 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Astuti, 2016)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2007)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

b. Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, seperti dikutip oleh (LAN, 2000) perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 4) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengakuan kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut (LAN, 2000) seperti yang dikutip oleh BPKP ada tiga jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan.
- 2) Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

d. Indikator Akuntabilitas

Menurut (Shafratunnisa, 2015) dalam penelitiannya akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan sektor publik
- 2) Adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan sektor publik
- 3) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
- 4) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sektor publik

2.4 Penelitian Sebelumnya

- a. Dalam penelitian (Shafratunnisa, 2015) yang berjudul "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik di SD Islam Binakheir" yang bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik di SD Islam Binakheir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik di SD Islam Binakheir sudah berjalan dengan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan dimulai dari yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran.
- b. Dalam penelitian (Indriani, 2019) yang berjudul "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar" yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengelolaan aset pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari teknik pengelolaan aset tetap. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field search* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang ada. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Teknis Pengelolaan Aset Nagari Supayang sudah dilakukan sesuai dengan teknik dan prosedurnya. Akan tetapi, belum semua

terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya SDM, keterbatasan IT, pemahaman dari perangkat Nagari mengenai pengelolaan aset Nagari yang transparansi dan akuntabel serta masing sangat kurangnya pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintahan.

- c. Dalam penelitian (Ardiyanti, 2019) yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitasm partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dari penelitian ini ialah Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dan variabel lainnya ialah Transparansi dan Akuntabilitas

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu penyebaran kuesioner kepada 30 pegawai aktif yang telah ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan program SPSS yang di dalamnya meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

4. ANALISIS DATA

1. Uji Validitas

	Corrceted Item Corelation		Corrceted Item Corelation		Corrceted Item Corelation
X1.1	.473	X2.1	.492	Y1	.702
X1.2	.362	X2.2	.510	Y2	.747
X1.3	.493	X2.3	.549	Y3	.807
X1.4	.426	X2.4	.440	Y4	.757
X1.5	.401			Y5	.573
X1.6	.391			Y6	.605
				Y7	.797
				Y8	.804

Sumber : (data diolah)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan didapatkan nilai *r* hitung > nilai *r* tabel (0,361). Oleh karena itu, masing-masing pernyataan setiap variabel adalah valid. Dikatakan valid artinya seluruh pernyataan telah jelas dan tepat.

2. Uji Reliabilitas

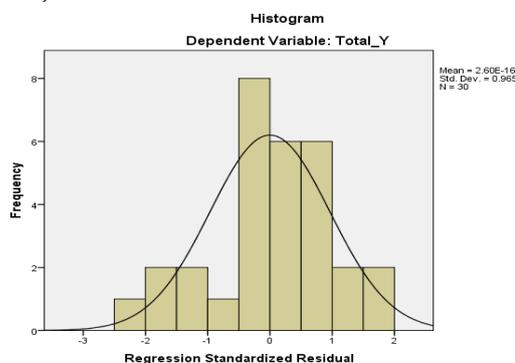
Variabel	Cronbach’s Alpha	N of Items
X1	.675	6
X2	.693	4
Y	.916	8

Sumber data : Data diolah

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan didapatkan nilai *Cronbach’s Alpha* > 0,5. Sehingga seluruh item pernyataan dapat dikatakan *reliable*. Dikatakan *reliable* artinya seluruh item pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber : Data diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit.

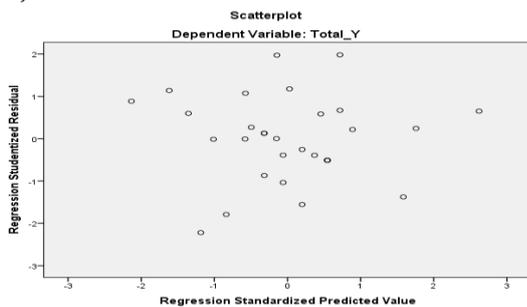
b. Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Transparansi	.893	1.120
Akuntabilitas	.893	1.120

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel adalah >0,01. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah <10,00. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah

Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan variabel independennya adalah transparansi dan akuntabilitas.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B
(Constant)	14,789
Transparansi	.390
Akuntabilitas	.588

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas, diperoleh koefisien variabel transparansi sebesar 0,390 dan akuntabilitas sebesar 0,588. Diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 14,789 + 0,390 + 0,599 + e$$

- 1) Apabila terjadi kenaikan transparansi sebesar 1%, maka pengelolaan keuangan sektor publik akan meningkat sebesar 0,390%. Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan. Kenaikan atau penurunan tersebut disebabkan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi transparansi yang digunakan dalam penelitian ini.
 - 2) Apabila terjadi kenaikan akuntabilitas sebesar 1%, maka pengelolaan keuangan sektor publik akan meningkat sebesar 0,588%. Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan. Kenaikan atau penurunan tersebut disebabkan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Model	Adjusted R Square
	.310

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, besarnya *adjusted R Square* adalah 0,310 atau sebesar 31%. Hal tersebut berarti variabel pengelolaan keuangan sektor publik dipengaruhi oleh kedua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas sebesar 31%. Sedangkan sisanya sebesar 69% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar dari penelitian.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Sig
(Constant)	.003
Transparansi	.038
Akuntabilitas	.028

Sumber : Data diolah

- 1) Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi pada transparansi sebesar 0,038 < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dapat diterima.
- 2) Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi pada akuntabilitas sebesar 0,028 < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dapat diterima.

d. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model	Sig
Regression	.003

Sumber : Data diolah

Pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Y) pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sektor publik. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap item pernyataan yang telah disediakan.

Hasil penelitian mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah daerah ini ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan transparansi ini, Kantor Bapenda Sulawesi Selatan menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan sektor publik yang disediakan di situs-situs web kantor. Masyarakat dapat mengaksesnya pada internet dengan mengetikkan link *bapendasulsel.web.id*. Hal ini mendukung salah satu indikator transparansi yaitu tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang pengelolaan keuangan sektor publik.

Selain analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan diperoleh nilai signifikan sebesar $0,038 < 0,05$. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Hasil tersebut

dikuatkan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden.

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas publik ditandai dengan adanya rincian laporan pertanggungjawaban seperti Rincian Laporan Belanja Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat sendiri di situs Kantor Bapenda. Selain itu, untuk mengetahui akuntabel atau tidaknya suatu instansi dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya sasaran kinerja program dan kegiatan seperti peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dalam hal ini Kantor Bapenda Sulsel dapat dikatakan telah akuntabel yaitu Kantor Bapenda sendiri telah menyusun program terkait hal akuntabilitas yang dapat diakses juga oleh situs Bapenda melalui internet.

Selain analisis di atas, berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikan sebesar $0,028 < 0,05$ dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil uji simultan (Uji F) keseluruhan variabel menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0,310 atau sebesar 31% yang menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan sektor publik dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 31%. Sisanya sebesar 69% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini seperti kinerja anggaran, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pengawasan anggaran dan penerapan standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh program Kantor Bapenda mengenai Target Capaian dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Aksebilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik terkait Pelayanan Pajak Daerah TA 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Bapenda Sulawesi Selatan telah menerapkan nilai-nilai transparansi dan

akuntabilitas karena dalam program rencana kerja mereka, mereka telah melakukan peningkatan terakrit hal transparansi dan juga akuntabilitas publik.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang pengaruh nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengeolaan keuangan sektor publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Variabel Transparansi (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,038 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yaitu Nilai Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Variabel Akuntabilitas (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,028 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yaitu Nilai Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Variabel Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yaitu Nilai Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani. (2017). *Implementasi Transparansi & Akuntabilitas sebagai upaya pencegahan korupsi*. Ngawi.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Rembang.
- Astuti. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa, Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014* Universitas Budi Surakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakrta: Erlangga.
- Choeri, E. O. (2018). *Mengenal Laporan Keuangan Sektor Publik Beserta Fungsi dan Tujuannya*. *Jurnal By Mekari*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://ppid/sulselprov.go.id>. (t.thn.).
- <https://www.bapendasulsel.web.id>. (t.thn.).
- Indriani. (2019). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*.
- LAN, B. (2000). *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas dan Good Governance*. makassar.sindonews.com/berita/22465/1-pemda-keluhkan-transparansi-dana-bagi-hasil-dari-bapenda-sulsel. (2019, Maret 12).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Surakarta: Andi.
- Nurrizkian, B. (2017). *Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13/ 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (t.thn.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (t.thn.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (t.thn.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (t.thn.).

peraturan wali kota makassar nomor 110 tahun 2016.
(t.thn.).

Shafratunnisa, F. (2015). *Implementasi Nilai-Nilai Transaparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Di SD Islam Binakheir*. Jakarta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang Pemerintah Daerah. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (t.thn.).

Wida. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogo Jampi Kabupaten Banyuwangi . Skripsi Program S1 Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember .*